

DIMENANGKAN BAWASLU KARANGANYAR
Lomba Fotografi Bawaslu RI



KR-Istimewa

Komisioner Bawaslu Karanganyar menerima penghargaan lomba fotografi dari Bawaslu RI.

KARANGANYAR (KR) - Potret Tri Winarti, Pengawas Pemilu Desa Menjing Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah saat menurunkan alat peraga kampanye (APK) memenangkan penghargaan karya foto terbaik yang diselenggarakan Bawaslu RI.

Pada gambar jepretan Ketua Panwascam Jenawi terlihat aktivitas pelepasan APK caleg yang dipaku di pohon.

Karya yang dikirim ke panitia lomba itu terpilih menjadi yang terbaik untuk kriteria penertiban alat peraga kategori kabupaten/kota. Penghargaanannya diterima Bawaslu Karanganyar saat menghadiri acara konsolidasi nasional evaluasi kelembagaan Bawaslu se-Indonesia di Jakarta, 20-23 April 2024.

Anggota Bawaslu Karanganyar, Ikhsan Nur Isfianto mengatakan penghargaan karya fotografi itu merupakan prestise organisasinya. Tak sekadar mendapat reward, namun juga bangga karena hasil kerja anggotanya diapresiasi. "Dalam foto terlihat, perempuan berjilbab memanjat pohon untuk mencabut paku yang ditancapkan pemasang APK," jelasnya.

Foto perempuan anggota pengawas pemilu yang sedang membersihkan APK dengan cara dipaku di pohon itu didokumentasikan dan diajukan ikut lomba, ternyata menjadi pemenang.

"Secara kelembagaan, Bawaslu Karanganyar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengawas ad hoc atas semangatnya menegakkan aturan pemilu. Selain pencegahan, mereka juga memiliki kompetensi dalam penindakan pelanggaran pemilu," tandas Ikhsan Isfianto.

(Lim)-f

THR DI SUKOHARJO SUDAH DIBAYARKAN

Posko Pengaduan Masih Dibuka

SUKOHARJO (KR) - Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1445 H atau Lebaran 2024 dari pihak perusahaan kebanyakan sudah diterima pekerja. Meski begitu, posko pengaduan masih dibuka. Apabila ada temuan pelanggaran, buruh atau bisa segera melapor ke posko.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno mengatakan, pihaknya sampai Selasa (23/4) belum menerima laporan aduan pelanggaran pembayaran THR dari buruh. Kemungkinan THR sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada buruh. "Meskipun demikian, FPB Sukoharjo tetap akan melakukan pengawasan bersama dengan melibatkan serikat buruh, untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang bisa muncul setelah lebaran," ungkapnya.

Potensi pelanggaran dimaksud

antara lain sistem pembayaran THR dari pihak perusahaan kepada buruh yang tidak sesuai aturan, misalnya dengan cara dicicil. "Pemerintah pusat sejak awal sudah menegaskan kepada pihak perusahaan agar melakukan pembayaran THR kepada buruh secara langsung penuh 100 persen dan tidak boleh dicicil," tegas Sukarno.

FPB Sukoharjo berharap kepada buruh, apabila ada pelanggaran agar segera melapor ke posko. Laporan bisa diberikan kepada Pemkab Sukoharjo maupun FPB Sukoharjo atau serikat buruh tempat buruh bekerja. "Buruh yang menerima pembayaran THR dengan cara dicicil mungkin takut lapor. Karena mereka berharap tetap bisa bekerja dan menerima THR di perusahaan, tanpa dikenakan sanksi," katanya.

Menurut Sukarno, dengan banyaknya buruh yang bekerja di Kabupaten Sukoharjo maka perlu



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani saat memantau pembayaran THR sebelum lebaran lalu.

dilakukan pengawasan bersama. Terlebih lagi jumlah industri juga sangat banyak dan tersebar di sejumlah wilayah. "Ada puluhan ribu buruh bekerja di Sukoharjo, dan itu perlu pengawasan bersama," tandasnya.

Secara umum, pembayaran THR

oleh perusahaan di Sukoharjo dinilai sudah berjalan lancar. "Buruh sudah menerima THR. Kami juga sudah melakukan pemantauan bersama Bupati Sukoharjo Etik Suryani, di wilayah Kecamatan Grogol sebelum lebaran lalu," jelas Sukarno.

(Mam)-f

DEWAN MINTA SOSOK YANG MUMPUNI

8 Calon Sekda Banyumas Ikut Ujian

BANYUMAS (KR) - Ketua Komisi 1 DPRD Banyumas yang membidangi pemerintahan dan hukum DPRD Banyumas, Sardi Susanto mengharapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas ke depan sosok yang mumpuni

serta berakhlak baik. "Harapan saya, Sekda Banyumas yang bisa *ngayomi, ngumahi, ngawaki* kepada Banyumas, serta tidak mempunyai beban terhadap permasalahan batin maupun lahir, serta memiliki kemampuan untuk komuni-

kasi dengan instansi eksternal," tandasnya, Selasa (23/4).

Menurutnya, saat ini ada delapan pejabat di lingkungan Pemkab Banyumas yang lolos seleksi administrasi terbuka, dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2024 sedang mengikuti ujian di salah satu perguruan tinggi negeri di Surakarta. Delapan pelamar calon Sekda dinyatakan telah memenuhi syarat dan lolos seleksi administrasi.

Mereka terdiri Agus Angraito (Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah), Agus Nur Hadie (Asisten

Administrasi Umum Sekda Banyumas), Budi Nugroho (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dedy Noerhasan (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah), Junaidi (Penjabat Sekretaris Daerah), Nungky Harry Rachmat (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banyumas), dan Wahyu Dewanto (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah).

Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKS-DM) Kabupaten Banyumas, Eko Prijanto menjelaskan, pelamar Sekda yang dinya-

takan lolos seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Yakni penelusuran rekam jejak (1-4 April), assesment test (22-24 April). Kemudian Pelaksanaan Penulisan Makalah (26 April), paparan hasil assesment test dan asesor ke Pansel (29 April).

Setelah test tersebut, lanjut Eko Prijanto, dilanjutkan wawancara dan paparan makalah (3-4 Mei). Penetapan dan pengumuman tiga terbaik (4 Mei). Setelah tahapan itu selesai, dilanjutkan penyampaian laporan hasil seleksi kepada Komisi ASN (6-27 Mei). "Rencana pelantikan Sekda Banyumas pada 28 Mei 2024," jelas Eko.

(Dri)-f

3 PELAKU BERHASIL DITANGKAP

Perampok Bersenjata Api Beraksi di Toko Emas

SEMARANG (KR) - Aksi perampokan melibatkan tiga pelaku bersenjata pistol, dengan sasaran toko emas di Blora telah berhasil diungkap petugas gabungan Polda Jateng, Polres Blora dan Polda Jatim. Selain itu Polda Jateng juga mengungkap kasus menonjol lain yakni pembunuhan sadis terhadap seorang wanita yang mayatnya dibuang di selokan, dekat kuburan di Sukoharjo.

Baik tiga pelaku kasus pembunuhan sadis merenggut nyawa gadis Herlina (22) di Sukoharjo maupun tiga pelaku perampokan bersenjata di Blora, Rabu(24/4) dihadirkan ke Mapolda Jateng dalam gelar kasus dipimpin Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.

Kapolda terkait kasus perampokan disertai penodongan senjata api pistol di toko emas 'Murni' milik Nur Hakim (61) di Desa Wado Kedungtuban Blora berhasil diungkapkan membutuhkan waktu sejak sejak kejadian 16 April 2024 selama sepekan.

Selain meringkus ketiga pelaku Gag (29), Mak (27)dan And (42) di Tulungagung Jatim, petugas juga menyita sebagian besar perhiasan emas, seperti gelang, cincin kalung yang belum sempat dijual. Semen-

tara kerugian di derita pemilik toko emas seberat 1,5 Ons senilai mencapai Rp 150 juta.

Nasib korban Nur Hakim berawal ia menjelang Lebaran, tepatnya Selasa (16/4) siang sekitar pukul 11.30 bersama dua karyawan Ahmah dan Abdullah berniat menutup toko. Namun, tidak diduga muncul komplotan perampok yang semua membawa pistol.

"Awat, diam, serahkan, saya tembak," gertak tersangka And sambil mengarahkan moncong pistol ke arah korban dan Sakai. Pemilik toko dan karyawannya yang dihantui rasa takut tidak berani melawan. Mereka hanya memandang para pelaku menguras semua perhiasan emas gelang,kalung, cincin senilai Rp 150 huta dimasukkan tas yang sudah dipersiapkan. Kemu-

dian pelaku dengan motor kabur.

Dari laporan korban, Dit Reskrim Polda Jateng dan Polres Blora terus bergerak.Keterangan sakai dikumpulkan, demikian juga hasil rekaman CCTV yang mengarah pelaku. Yang akhirnya identitas pelaku terdeteksi. Semua pelaku berasal dari luar Jateng. Dari data

yang dikumpulkan, petugas gabungan didukung Polda Jatim akhirnya berhasil meringkus para pelaku. Mula-mula pada 21 April pagi sekitar pukul 04.00 dibekuk Gag dan Mak di rumah Gaguk di Tulungagung. Esok harinya menyusul ditangkap And di rumah kontrakan di Tetek Tulungagung.

(Cry)-f



KR-Karyono

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menunjukkan barang bukti pistol, sementara disampingnya ketiga pelaku.

SENGKETA DI PMI KOTA YOGYA

Bukan Barang Sitaan, Dokumen PMI Diloakkan



KR-Juvintarto

Terdakwa MT terharu dan memeluk Herman Doddy jemaah yang setia mengikuti persidangan di Pengadilan Tipikor Yogya.

YOGYA (KR) - Kejadian 'meloakkan' atau menjual kertas-kertas dokumen keuangan PMI Kota Yogya tidak bisa dikategorikan sebagai melakukan pemusnahan barang bukti. Dokumen diloakkan staf PMI Kota dalam acara kerja bakti ke pengepul saat itu tidak berstatus sebagai barang bukti atas terdakwa MT (42) mantan relawan pengurus harian PMI 2016-2021. Apalagi MT juga tidak melakukan korupsi hasil penjualan 'loak' dokumen tersebut.

Hal ini disampaikan dua saksi ahli yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa MT. "Jeratan pidana Pasal 10 UU Tipikor No 31/1999 pada terdakwa mengatur mengenai barang bukti tidak bisa dikenakan pada terdakwa. Karena dokumen yang diloakkan tesebut belum dinyatakan sebagai

barang bukti," tegas saksi ahli hukum, Dosen FH Hukum UII, Dr Mahrus Ali, dalam persidangan saksi ahli ad charge (meringankan), Selasa (23/4) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Hubungan Industrial Yogyakarta Jalan Prof Dr Soepomo SH Kota Yogya.

Di depan Majelis Hakim yang diketuai Sri Harsiwi SH MH, Mahrus Ali menegaskan seharusnya jaksa langsung melakukan sita atas dokumen-dokumen yang dinyatakan sebagai barang bukti. "Kejahatan Korupsi menyangkut jabatan, perlu didalamani dan dilakukan penyitaan barang bukti baru ditentukan terdakwa," tegasnya.

Sementara saksi ahli akuntan publik, Fatkhur Rokhman SE MM Ak CA CIFE CDA RSA, menyatakan doku-

men kertas (cetak) yang diloakkan tersebut bukan satu-satunya sumber dokumen keuangan karena di era digital ini biasanya juga sudah tersalin dengan baik secara digital. "Seperti bank-bank yang kebakaran tidak masalah dengan dokumen yang terbakar," tegasnya.

Apalagi secara kelembagaan PMI bukan lembaga negara walau pembentukan dengan UU sehingga pengelolaan keuangan mandiri. "Jadi ketika mendapat hibah keuangan dari negara maupun swasta maka bukan termasuk keuangan negara, bisa disebut korupsi kalau dana hibah yang digunakan PMI dicatut oknum. Tapi sepanjang dana hibah masuk semua ke keuangan PMI maka, pengurus bisa menggunakan secara mandiri untuk operasional PMI," tandasnya. (Vin)-f